

Kebijakan Pemerintah dan Sistem Ketahanan Pangan Studi Kasus di Provinsi Banten

Government Policy and Food Security System Case Study: Banten Province

**Ria Jayanthi*¹, Anggini Dinaseviani², Gyska Indah Harya³, Diah Anggraeni
Jatraningrum⁴**

^{1,2,4}Badan Riset dan Inovasi Nasional; ³Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jawa Timur; *¹Jl. Gatot Subroto, No.10, Jakarta, (021) 5225711
e-mail: *¹riajayanthi1991@gmail.com,

ABSTRAK

Kebijakan ketahanan pangan merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, pada tingkat nasional maupun daerah. Provinsi Banten memiliki masalah pada harga pangan yang meningkat dan ketersediaan yang tidak merata. Hal ini dapat diketahui pada masing-masing sub sistem ketahanan pangan (SKP) yakni ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kebijakan dan permasalahan pada SKP di Provinsi Banten. Penelitian menggunakan studi kualitatif menghasilkan data deskriptif dan eksplanatif. Pengumpulan data dengan studi literatur dan data resmi, serta wawancara perangkat organisasi di Provinsi Banten. Hasilnya menyatakan bahwa ketidakstabilan pasokan pangan di Provinsi Banten terjadi pada beberapa komoditas. Hal ini karena distribusi komoditas pangan yang banyak bergerak ke luar daerah. Rantai distribusi pangan sudah ideal, namun pemanfaatannya belum merata, khususnya kabupaten. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, namun hasilnya belum optimal karena dua masalah. Pertama, tumpang tindihnya regulasi dan kegiatan terkait pangan karena kurangnya koordinasi. Kedua, berbagai kebijakan dan program terkait penyelenggaraan ketahanan pangan masih bersifat kuantitatif. Penelitian ini penting dilakukan untuk memberi solusi atas permasalahan ketahanan pangan yang sering terjadi di beberapa daerah di Indonesia, kemudian menghasilkan saran yang tepat untuk ketahanan pangan yang lebih ideal.

Kata kunci— *Banten, Kebijakan, Ketahanan, Pangan, Sistem*

ABSTRACT

Food security policy refers to Law Number 18 of 2012, that the state is obliged to realize the availability, affordability, and fulfillment of sufficient, safe, quality, and balanced nutritional food consumption. Banten Province has problems with increasing food prices and uneven availability. This can be seen in each food security subsystem, namely availability, affordability, and utilization. This study aims to identify policies and problems in the food security system in Banten Province. The study used qualitative studies to produce descriptive and explanatory data. Data collection with literature

studies and official data, as well as interviews with organizational devices in Banten. The results that the instability of food supply in Banten occurred in several commodities, because the distribution of food commodities moves outside the region. The food distribution chain is ideal, but its utilization is not evenly distributed, especially in districts. Various efforts have been made by the government, but the results have not been optimal due to two problems. First, overlapping regulations and activities related to food due to lack of coordination. Second, various policies and programs related to the implementation of food security are still quantitative. This research is important to provide solutions to food security problems that often occur in several regions in Indonesia, and then produce appropriate suggestions for more ideal food security.

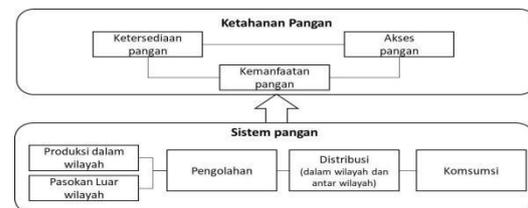
Keywords— Banten, Food, Policy, Security, System

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan dan kestabilan harganya merupakan salah satu tantangan ekonomi Indonesia. Ketahanan pangan didefinisikan sebagai: “keadaan ketika semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman dan bergizi, yang memenuhi kebutuhan pangan dan preferensi pangan untuk hidup aktif dan sehat” (FAO, 1996). Merujuk pada Undang-Undang (UU) No.18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketahanan pangan adalah “kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan”. Pasal 13 menyebutkan bahwa “pemerintah berkewajiban untuk mengelola stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, cadangan pangan, serta distribusinya untuk mewujudkan kecukupan pangan bagi masyarakatnya”. Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi juga terlihat dalam Gambar 1, bahwa ketahanan pangan suatu wilayah memerlukan pengembangan sistem dari hulu hingga

ke hilir, dari produksi hingga konsumsi, serta dari segi jumlah maupun asupan gizi yang terkandung di dalamnya (Mbow et al., 2020).

Sistem pangan adalah aktivitas pangan dari produksi hingga konsumsi. Hasil dari Sistem Pangan berkontribusi terhadap ketahanan pangan sebagai wujud dari *outcome* yakni terpenuhinya ketahanan pangan yang terdiri dari ketersediaan, keterjangkauan atau aksesibilitas, dan pemanfaatan. Sistem pangan sebagai penggerak, kegiatan, dan hasil terpadu untuk ketahanan pangan (Ingram, 2011; Mbow et al., 2020; Porter et al., 2014).



Gambar 1. Sistem Pangan dan Ketahanan Pangan

Sumber: di adaptasi dari Ingram (2011); Mbow et al. (2020); Porter et al. (2014)

Sejalan dengan PP No 17 Tahun 2015 dengan merujuk pada UU No. 18 Tahun 2012 disebutkan bahwa “Sistem Ketahanan Pangan (SKP) meliputi tiga sub sistem, yaitu: a. ketersediaan dengan sumber utama penyediaan dari produksi dalam negeri dan cadangan pangan; b. keterjangkauan oleh seluruh masyarakat, baik secara fisik maupun

ekonomi; dan c. pemanfaatan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi, termasuk pengembangan keamanan pangan”. Serupa dengan UU tersebut, beberapa studi (FAO, 2008; Ingram, 2011; Rohr et al., 2021; Mbow et al., 2020; Bapanas, 2022) juga menyebutkan bahwa di dalam SKP, ada tiga aspek utama yang harus diperhatikan dalam pemenuhan ketahanan pangan, yaitu: ketersediaan pangan (*food availability*) (produksi dan distribusi), akses terhadap pangan (*access to food*) (fisik, ekonomi, politik dan sosial-budaya), dan pemanfaatan pangan (*food utilization*) (nutrisi, keamanan, sosial, budaya, dan agama). Hal ini mengarahkan pada perlunya SKP yang dibentuk oleh setiap pemerintah daerah di Indonesia. Kemudian UU No. 18 Tahun 2012 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Banten No. 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pangan, di dalam Pasal 14 yang menyatakan bahwa “*Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan pangan daerah bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan*”. Peraturan ini memberikan landasan bagi Pemerintah Provinsi Banten berupaya meningkatkan dan memperkuat SKP guna optimalisasi proses distribusi pangan, mencegah krisis pangan, dan menanggulangi persoalan-persoalan kekurangan pangan yang ada di wilayahnya. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi apa saja permasalahan dan bagaimana kondisi pada SKP, serta apa saja kebijakan perundang-undangan terkait pangan yang berlaku di Provinsi Banten.

METODE PENELITIAN

Kajian ini merupakan studi kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif dan eksplanatif. Fenomena yang ada secara empiris secara langsung dianalisis menggunakan teori sebagai panduannya. Data primer diperoleh dari hasil diskusi dengan informan sebagai perwakilan organisasi dalam tata kelola kelembagaan terkait pangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui penelusuran literatur ilmiah baik berupa jurnal, artikel, buku, prosiding, dokumen dan data resmi dari pemerintah, dan berbagai dokumen yang diperlukan. Teknik pengumpulan data kualitatif melalui aktivitas wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus atau *focused group discussion* (FGD) baik secara online/offline/hybrid. Wawancara mendalam dilakukan kepada informan terpilih sesuai dengan kategori data yang diperlukan. Kemudian dilanjutkan dengan FGD dengan beberapa informan dalam pengambilan data tersebut. Selain itu, pengamatan data dari *website* resmi juga dilakukan untuk memperkuat hasil temuan di lapangan. Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam studi ini ialah panduan wawancara, catatan lapangan, alat rekam, dan kamera. Lokus kajian ini ialah di wilayah Pemerintahan Provinsi Banten.

Tahapan metode analisis yakni; kodifikasi data, penyajian data dari temuan penelitian yang dikelompokkan, kemudian penarikan kesimpulan dari temuan data dan wawancara, serta verifikasi dengan teknik triangulasi. Triangulasi ini dilakukan dengan cara melakukan FGD, diskusi dengan pakar, serta penelusuran literatur. Pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian adalah organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi informan kunci dari studi ini sebanyak 8 orang dengan rincian;

perwakilan dari Dinas Ketahanan Pangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bidang Penelitian dan Pengembangan, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan perwakilan akademisi atau peneliti. Penentuan informan ini berdasarkan rekomendasi dari Bappeda bidang Penelitian dan Pengembangan Provinsi Banten yaitu informan yang mewakili OPD dan memiliki pengetahuan berkaitan langsung dengan kebijakan pangan. Waktu penelitian ialah tahapan teknis terkait aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan oleh peneliti selama kurang lebih 3 (tiga) bulan yakni Oktober- Desember Tahun 2023 dengan sumber biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi termuda di Indonesia yang telah terbentuk sejak 4 Oktober 2000. Provinsi yang memiliki luas 8.651,20 km², merupakan pusat industri besar dan sedang, serta perdagangan jasa di Pulau Jawa. Wilayah administrasi Provinsi Banten terdiri dari 4 (empat) kota dan 4 (empat) kabupaten yang strategis karena sebagian wilayahnya menjadi penyangga Ibukota, serta pintu masuk dan keluar ke pulau lainnya (Budiawati & Natawidjaja, 2020). Banten juga memiliki potensi SDA yang cukup besar khususnya tambang, perikanan, dan pertanian (Kementerian Keuangan, 2013). Lahan perkebunan, pertanian, persawahan, dan perairan laut merupakan sumber ekonomi daerah, baik untuk pemenuhan kebutuhan pangan lokal maupun Provinsi lain di

sekitarnya. Banten memiliki komoditas pangan unggulan antara lain adalah : beras, lada, daun talas beneng, melon emas, manggis, dan melinjo (Rantau et al., 2022).

Banten memiliki pangan lokal unggulan yang di lihat dari 3 (tiga) sudut pandang, yaitu regulasi, program pemerintah, dan permintaan ekspor. Dari segi regulasi sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Banten No. 62/ 2021 terdapat tiga pangan lokal unggulan Provinsi Banten, yaitu: talas beneng, ubi jalar, dan ubi kayu. Ketiga komoditi ini memiliki harga minimum pangan lokal, yaitu harga pembelian di tingkat petani yang ditetapkan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar, antara lain biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa lahan, keuntungan, dan/atau biaya input produksi lainnya. Dari segi program pemerintah, menurut Kementerian Pertanian (2022), Banten memiliki kedelai lokal unggulan dengan lahan pengembangan mencapai 11.580 ha di tiga kabupatennya. Dari segi permintaan ekspor, buah-buahan tahunan yang menjadi komoditas unggulannya adalah manggis, petai, dan jengkol, dan buncis. Walaupun memiliki banyak pangan unggulan, Provinsi Banten memiliki masalah terkait ketahanan pangan masyarakat yang masih menjadi prioritas rencana kerja pemerintah beserta dinas terkait setiap tahunnya.

A. Identifikasi Permasalahan terkait Sistem Ketahanan Pangan di Provinsi Banten

Berdasarkan laporan dari Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang), seluruh program terkait Ketahanan Pangan Tahun 2022 masih di bawah target (Tabel 1). Namun, di sisi lain, Provinsi Banten naik ke urutan 13 dari urutan ke-18 tahun 2022 (dari 34 provinsi) dalam perhitungan indeks ketahanan pangan (Bapanas, 2022; 2023). Data ini

menunjukkan bahwa meskipun indeks ketahanan pangan membaik, tetapi isu pangan masih menjadi persoalan yang krusial bagi Provinsi Banten untuk saat ini dan beberapa tahun ke depan. Hal ini mengingat laju pertumbuhan penduduk menyebabkan peningkatan permintaan, sehingga ketersediaan dan pemerataan distribusi pangan masih belum memenuhi target. Menurut Dinas Ketapang (2022), tidak tercapainya

target-target tersebut diantaranya karena daya beli pangan rumah tangga menurun akibat dampak PHK, masa panen tidak merata, rendahnya diversifikasi konsumsi pangan, belum termanfaatkannya pangan lokal, luas lahan pertanian yang menyusut akibat konversi secara masif, biaya produksi petani yang tinggi, serta kurangnya tenaga fungsional uji mutu hasil pangan segar asal tumbuhan (PSAT).

Tabel 1. Capaian dan Target Program Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2022

Indikator	Target (%)	Realisasi/ Capaian (%)	Keterangan (hasil)
Keterjangkauan dan Akses Pangan	86.50	74.03	Kurang dari target
Pemanfaatan Pangan	82.50	69.21	Kurang dari target
Ketersediaan Pangan	94.50	84.45	Kurang dari target
Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang tersertifikasi	10.00	7.09	Kurang dari target

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten (2022)

Hal ini juga di dukung oleh temuan Rantau et al. (2022), bahwa permasalahan pangan di Banten diantaranya terkait laju produksi yang melandai, terhambatnya distribusi sarana produksi, ketersediaan air akibat peralihan fungsi lahan, iklim global yang berdampak pada waktu panen, bencana alam kekeringan, belum berkembangnya bahan pangan lokal, sarana dan prasaran pascapanen, dan sistem informasi pasar. Hal ini juga di dukung oleh temuan peneliti berdasarkan data dan wawancara dengan informan, yang menyatakan bahwa secara umum perkembangan produksi pangan di Provinsi Banten tahun 2020-2022 sangat fluktuatif yakni terjadi peningkatan produksi pada beberapa komoditas, namun juga penurunan pada beberapa komoditas. Selain itu, masyarakat Indonesia masih bergantung kepada komoditas beras yang dibuktikan dengan tingginya sumbangan komoditas ini terhadap penentuan garis kemiskinan di Indonesia, tidak terkecuali di Banten. Sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki karakteristik geografis

yang beragam dan menghasilkan komoditi pangan yang bervariasi, komoditas beras di Banten masih diperoleh neraca surplus. Meskipun begitu, harganya mengalami lonjakan. Sementara itu, jika dilihat per kab./kota, terdapat 3 (tiga) kabupaten yang merupakan sentra produksi beras, mengalami surplus (Pandeglang, Lebak, Serang), sedangkan lainnya mengalami defisit (BPS Provinsi Banten, 2023a). Hal ini disebabkan salah satunya oleh karakteristik elastisitas permintaan beras yang cenderung mendorong para pedagang untuk menaikkan harganya. Selain itu, karena pola konsumsi pangan masyarakat Banten belum beragam, padahal berbagai produk pangan lokal dan sumber umbi-umbian cukup melimpah namun belum banyak dimanfaatkan, sehingga mengakibatkan rendahnya harga jual jenis umbi-umbian. Di dukung oleh studi Ansori (2021) yang menemukan bahwa kualitas konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Lebak masih rendah, terutama diakibatkan oleh masih tingginya ketergantungan kecukupan energi dari kelompok padi-

padian yang mencapai sekitar 71.6 persen Angka Kecukupan Energi (AKE). Hal ini juga menyebabkan Kab. Lebak masuk sebagai kabupaten penerima bantuan pangan karena tingkat keparahan kemiskinannya yang paling tinggi di Provinsi Banten (Suryana, 2023). Hal ini dipicu oleh persepsi yang berlaku umum yaitu “belum makan, kalau belum makan nasi”. Di samping itu sebagian masyarakat beranggapan jika mengonsumsi umbi-umbian, jagung, atau sagu dianggap inferior (makanan orang miskin). Kemudian, produksi pangan pertanian sebagian besar dihasilkan oleh petani kecil yang lokasinya tersebar. Para petani tersebut memiliki otoritas dalam menentukan keputusan tanam (jenis tanaman, waktu) tanpa ada pengaturan pola tanam antar wilayah. Di sisi lain, produksi pertanian di Banten tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan di dalam daerah, karena distribusi hasil pertanian sebagai stok pangan masyarakat banyak bergerak ke Jabodetabek secara *Business to Business* dengan harga yang lebih menarik. Faktor ketersediaan juga dipengaruhi oleh gaya hidup masyarakat Banten yang bertipe *urban society*. Dengan kehidupan yang dinamis, mereka cenderung mengonsumsi makanan cepat saji (*fast food*) yang memiliki nilai gizi yang sangat rendah (*junk food*). Tanpa mempertimbangkan keragaman konsumsi dan bagaimana asupan gizi yang diterima oleh tubuh. Beberapa permasalahan tersebut menyebabkan fakta sesuai data Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten (2021), ditemukan bahwa 8 dari 155 kecamatan di Provinsi Banten mengalami kerentanan pangan. Selaras dengan studi Porter et al., (2014) yang menunjukkan bahwa fluktuasi harga pangan terjadi akibat ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. Oleh karena itu, berbagai isu pangan yang diuraikan

sebelumnya berdampak pada kekurangan pasokan serta disparitas harga pangan, kemudian mengarah kepada perlunya upaya memperkuat ketahanan pangan khususnya pada tiap pilar SKP.

B. Kebijakan dan kondisi pada Sistem Ketahanan Pangan di Provinsi Banten

Beras, jagung, bawang merah, cabai merah, daging ayam dan sapi adalah beberapa komoditas pangan berdasarkan Perda Banten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pangan, yang merupakan regulasi daerah tertinggi di Provinsi Banten dalam mengatur dan mengelola pangan daerah. Selain itu juga termasuk 6 dari 11 produk pangan pokok menurut PERPRES No. 125 Tahun 2022 yang akan diuraikan dalam mewakili ketersediaan pangan di Provinsi Banten. Ketersediaan pangan dikatakan surplus jika produksi lebih banyak daripada konsumsi, sedangkan defisit jika produksi tidak dapat memenuhi permintaan konsumsi.

1. Aspek Ketersediaan Komoditas Pangan di Provinsi Banten

- 1) Beras, secara umum, Provinsi Banten mengalami surplus sekitar 394 ribu ton. Sentra produksi beras yaitu Kab. Pandeglang, Lebak, dan Serang. Namun, sebagian besar yang mengalami defisit adalah wilayah urban. Selain untuk konsumsi penduduk di dalam provinsi juga di pasok ke wilayah lain seperti Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, dan DKI Jakarta.
- 2) Jagung di Provinsi Banten pada Tahun 2022 mencapai produksi sekitar 52 ribu ton. Kab. Pandeglang dan Lebak berkontribusi sekitar 90 persen

dari total produksi. Banten mengalami surplus 33 ribu ton. Selain memenuhi kebutuhan sendiri, dipasarkan juga ke wilayah Jawa Barat.

- 3) Bawang merah di produksi tahun 2022 sebesar 1.372 ton. Kab. Serang berkontribusi sebesar 77 persen dari total produksi. Total konsumsi bawang merah Provinsi Banten mencapai sekitar 36 ribu ton. Oleh karena itu, Banten mengalami defisit 34,6 ribu ton. Untuk memenuhi defisit tersebut, banyak dipasok dari DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.
- 4) Cabai merah di produksi tahun 2022 mencapai 1.453 ton. Kab. Pandeglang dan Serang, berkontribusi sebesar 46 persen dan 33 persen. Namun, Banten mengalami defisit 30,5 ribu ton. Defisit tersebut di pasok juga dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
- 5) Daging ayam di produksi tahun 2022 mencapai 221 ribu ton. Kota

Tangerang berkontribusi sebesar 33 persen dari total produksi Banten, sehingga mengalami surplus sebesar 103 ribu ton yang dapat di jual ke DKI Jakarta dan Jawa Barat.

- 6) Daging sapi di produksi tahun 2022 mencapai 20 ribu ton. Kota Tangerang dan Tangerang Selatan berkontribusi sebesar 66 persen dari total produksi. Oleh karena itu, Banten mengalami surplus sebesar 13 ribu ton yang juga dipasarkan ke Jawa Barat.

Berdasarkan pemetaan diatas, dapat dilihat bahwa Provinsi Banten mengalami defisit ketersediaan untuk sebagian besar komoditas pangan pokok jika dilihat per kab./kota, namun secara keseluruhan mengalami surplus (Tabel 2). Akan tetapi, surplus tersebut lebih banyak dimanfaatkan untuk di jual ke daerah lainnya dengan harga yang lebih menarik dan menguntungkan produsen maupun distributor.

Tabel 2. Ringkasan Perhitungan Ketersediaan Komoditas Pangan Pokok

Kabupaten/Kota	Beras	Jagung	Bawang Merah	Cabai Merah	Daging Ayam	Daging Sapi
Kab. Pandeglang	+	+	-	+	-	-
Kab. Lebak	+	+	-	-	-	-
Kab. Tangerang	-	-	-	-	-	-
Kab. Serang	+	-	+	+	-	-
Kota Tangerang	-	-	-	-	+	+
Kota Cilegon	-	-	-	-	-	-
Kota Serang	-	-	-	-	-	-
Kota Tangerang Selatan	-	-	-	-	-	+
Provinsi Banten	+	+	-	-	+	+

Sumber : BPS Provinsi Banten (2023a)

2. Aspek Aksesibilitas Komoditas Pangan di Provinsi Banten

Sebagai salah satu sub sistem ketahanan pangan, aspek aksesibilitas atau keterjangkauan berkaitan dengan distribusi pangan dari produsen sampai

konsumen melalui mekanisme pasar. Umumnya, rantai distribusi pangan di Indonesia terdiri dari aktor utama sebagai pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi dan berkontribusi langsung dalam pergerakan barang (baik berupa bahan mentah maupun produk jadi) dari hulu ke hilir. Kemudian, aktor

pendukung yang tidak terlibat langsung dalam transaksi ekonomi, tetapi memiliki peran krusial dalam meningkatkan kinerja suatu sistem rantai pasok pertanian agar produk dapat mengalir dari hulu ke hilir secara efektif dan efisien (Kusnandar, 2021; Van der Vorst et al., 2007).

Rantai distribusi komoditas pangan pokok di Banten cukup ideal untuk mengalirkan produk, dari petani sebagai produsen ke konsumen, minimal harus melewati dua aktor, yaitu pedagang besar (distributor, grosir) dan pedagang eceran (Gambar 2). Seharusnya, rantai pasok akan semakin efisien dan *cost distribution* dapat di tekan sehingga tercipta stabilisasi harga pangan. Selain itu, pasokan dari luar provinsi menjadi sangat penting karena Banten mengalami defisit pada sebagian besar komoditas pangan pokok, sehingga tergantung dari wilayah lain untuk pemenuhan kebutuhannya. Rantai distribusi pangan pokok yang di pasok dari luar provinsi lebih panjang dari pada yang di pasok dari dalam provinsi. Hal tersebut dikarenakan melibatkan aktor-aktor dari luar provinsi. Selain itu, harga komoditas pangan juga di tentukan oleh MPP (Margin Perdagangan dan Pengangkutan) perantara pada rantai distribusi pangan. Rasio MPP adalah rata-rata perolehan margin per pedagang (perantara) setelah dikurangi biaya transportasi. Rasio MPP pada 6 (enam) komoditas pangan di Provinsi Banten berkisar 6.69 persen hingga 43.02 persen per komoditas (BPS Provinsi Banten, 2021; BPS 2015; 2019; 2022a; 2022b; 2022c; 2022d).

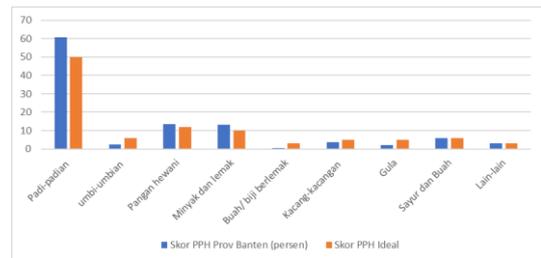


Gambar 2. Rantai Distribusi 6 Komoditas Pangan dari Dalam dan Luar Provinsi Banten

Sumber: hasil sintesa dari BPS (2015; 2019; 2022a; 2022b; 2022c; 2022d)

3. Aspek Pemanfaatan Komoditas Pangan di Provinsi Banten

Aspek pemanfaatan pangan terkait dengan pola konsumsi, penganekaragaman konsumsi, gizi, dan mutu pangan. Pemanfaatan pangan merujuk pada penggunaan pangan oleh rumah tangga dan kemampuan individu untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi. Salah satunya melalui keanekaragaman konsumsi pangan yang dapat di lihat dari skor PPH (Pola Pangan Harapan) (Bapanas, 2022; 2024). Berdasarkan Gambar 3, konsumsi umbi-umbian, sayur dan buah, serta kacang-kacangan masih perlu ditingkatkan. Namun, konsumsi padi-padian, minyak, dan lemak melebihi anjuran, begitu juga konsumsi pangan hewani sedikit berlebihan sebaiknya diturunkan untuk mencapai komposisi pangan yang beragam.



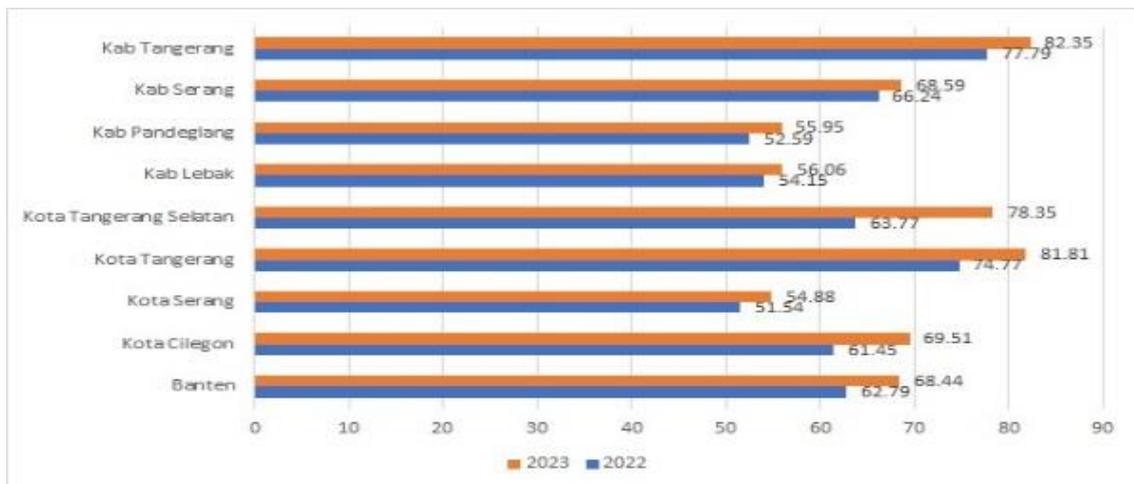
Gambar 3. Skor Pemanfaatan Pangan berdasarkan Keanekaragaman Konsumsi Pangan Ideal

Sumber: Bapanas (2024)

Indeks ketahanan pangan pada aspek pemanfaatan tahun 2022 Provinsi Banten sebesar 62,79 naik menjadi 68,44 tahun 2023. Walaupun meningkat, namun masih di bawah target

pemerintah, yakni sebesar 82,50 (Bapanas, 2022; Dinas Ketapang, 2022). Selain itu, walaupun indeks ketersediaan pangan cukup besar karena wilayah kabupaten mampu memproduksi bahan pangan sendiri. Dalam hal pemanfaatan pangan, hasil produksi di wilayah kabupaten cenderung rendah, hal ini karena pangan yang berkualitas dimanfaatkan oleh masyarakat di luar wilayah tersebut. Ketika produsen di Banten mampu mendistribusikan bahan pangan ke luar wilayah produksi maka pemanfaatan menurun. Hal ini mengakibatkan inflasi pada komoditas pangan akibat kelangkaan secara

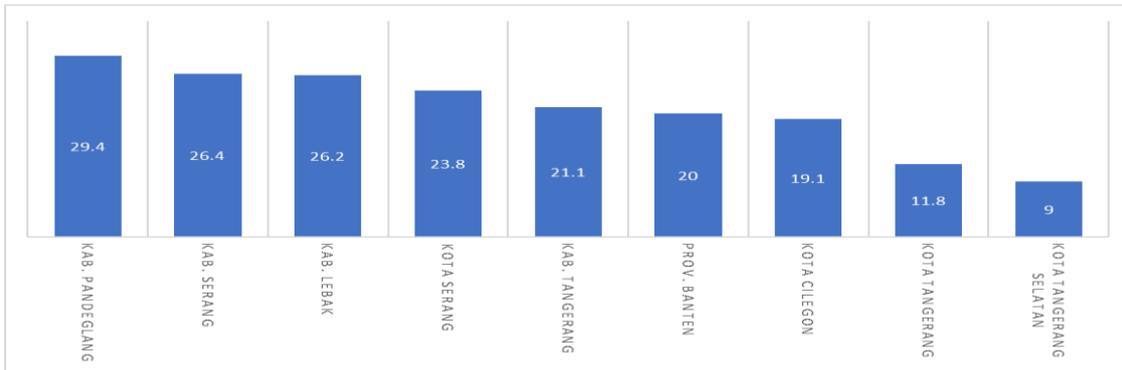
berkelanjutan. Selain itu, salah satu faktor yang mendorong indeks pemanfaatan pangan di wilayah kabupaten rendah adalah kemiskinan. Hal ini mengakibatkan daya serap pemanfaatan komoditas pangan di wilayah kota lebih besar dibandingkan kabupaten (Gambar 4). Tingkat perekonomian di wilayah kota yang lebih besar adalah salah satu pendorong indeks pemanfaatan meningkat. Dengan karakteristik masyarakat yang tinggal di wilayah kota, dapat disimpulkan bahwa ketahanan pangan di nilai aman meskipun tidak mampu memproduksi komoditas pangan.



Gambar 4. Indeks Pemanfaatan Pangan Per wilayah Kabupaten/Kota di Banten
Sumber: Bapanas (2023)

Keberhasilan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan sangat ditentukan oleh ketersediaan aneka ragam pangan dan perilaku konsumen dalam mengonsumsi aneka ragam pangan. Efektivitas percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan akan tercapai apabila upaya internalisasi di dukung dan berjalan seiring dengan pengembangan bisnis pangan lokal

(Dinas Ketapang, 2021; 2022). Oleh karena itu, program penganeekaragaman konsumsi pangan di daerah perlu diselaraskan khususnya dalam pengembangan pertanian, perikanan dan industri pengolahan pangan guna memajukan perekonomian wilayah. Upaya ini dilakukan secara kolaborasi antar pemerintah pusat dan daerah.

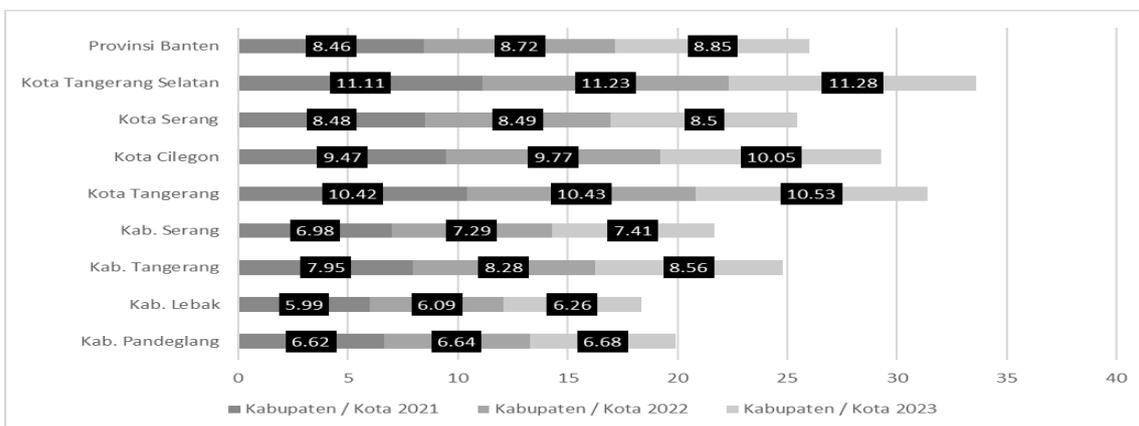


Gambar 5. Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2022

Sumber: Kemenkes RI (2022)

Selain penganeekaragaman pangan, status gizi masyarakat yang tercermin dari angka stunting dan lama sekolah perempuan juga di nilai sebagai indikator pemanfaatan pangan. Stunting adalah permasalahan gizi kronis karena kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang cukup lama. Prevalensi Stunting adalah jumlah keseluruhan permasalahan stunting yang terjadi pada waktu tertentu di sebuah daerah. Di Banten tahun 2022 adalah sebesar 20 persen, mengalami penurunan jika dibanding pada tahun 2021 yang sebesar

24.5 persen (Dinas Ketapang 2021; Bapanas, 2023). Namun, tingkat stunting di kabupaten lebih tinggi daripada di kota (Gambar 5). Hal ini berkorelasi juga dengan tingkat pendidikan perempuan di wilayah kabupaten (Gambar 6). Selain stunting, studi di berbagai negara menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan pengetahuan perempuan terutama ibu dan pengasuh anak tentang gizi berkorelasi kuat dengan status gizi anaknya (Kemenkes, 2022; Dinas Ketapang, 2021; Bapanas, 2023).



Gambar 6. Rata-rata Lama Sekolah Perempuan di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

Sumber: BPS Provinsi Banten (2024)

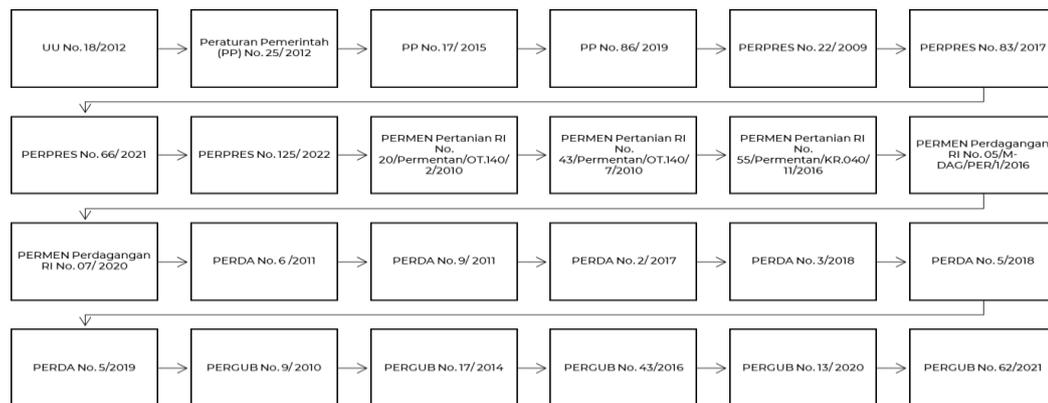
Peraturan Perundangan Level Nasional dan Daerah Terkait Pangan

Ruang lingkup kebijakan maupun regulasi terkait pangan mengatur terkait produksi, distribusi, dan pemanfaatan

atau konsumsi pangan. Kebijakan di tingkat nasional dan daerah terkait hal tersebut menerapkan prinsip keadilan, kesejahteraan masyarakat, keanekaragaman pangan, keberlanjutan lingkungan, partisipasi masyarakat,

kesehatan dan keamanan pangan, kerjasama dan kemitraan, serta ketahanan terhadap perubahan iklim. Kebijakan ketahanan pangan memerlukan dukungan lintas sektor dan aktor yang berperan penting dalam mencapai tujuan SKP yakni tersedianya pangan yang cukup dengan harga yang terjangkau, dan gizi yang baik. Selain itu, penyerahan kewenangan pemerintahan kepada daerah otonom

memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengatur secara langsung penyelenggaraan pangan sesuai dengan amanat UU No. 18/2012 tentang Pangan. Adapun dukungan lintas sektor dalam lingkup pemerintah daerah tercermin dalam beberapa Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Gubernur (PERGUB) sebagai regulasi pangan lokal dari tahun 2010 hingga 2021.



Gambar 7. Regulasi terkait SKP yang berlaku di Provinsi Banten

Sumber: diolah dari database Peraturan BPK dan JDIH Setneg (2024)

Beberapa peraturan di atas merupakan kebijakan lintas sektor, pusat, dan daerah guna memperkuat SKP (ketersediaan, akses, dan pemanfaatan) di Provinsi Banten. Kekuatan peraturan tersebut sangat mengikat dalam waktu lama karena berupa peraturan pusat dan daerah yang dilegitimasi oleh Gubernur Provinsi Banten selaku lembaga eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif. Hal ini merupakan bentuk komitmen dari Pemerintah Provinsi Banten dalam hal penguatan SKP secara berkelanjutan di wilayahnya. Selanjutnya, makna kedua yakni berbagai kebijakan seperti regulasi, program, ketetapan pemerintah, serta kegiatan terkait pangan yang berlaku di masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari program kegiatan yang telah dilakukan oleh OPD terkait untuk memperkuat

SKP di Provinsi Banten, diantaranya adalah:

- 1) Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) sebagai bagian dari tim pengendalian inflasi pusat dan daerah bersinergi dengan Bank Indonesia, BPS, Bulog, dan mitra strategis lainnya. GNPIP mengendalikan inflasi pangan di sisi *supply* dengan mendorong produksi dan mendukung UMKM (Bank Indonesia, 2023).
- 2) Operasi Pasar atau Sidak Pasar yang dilakukan Disperindag, Biro Ekbang, dan Bulog untuk menjaga stabilisasi ketersediaan dan harga beras di pasar.
- 3) Gelar Pangan Murah yang dilakukan Dinas UKM, Dinas Ketapang, dan OPD lainnya di Kab./Kota di 92 lokasi di seluruh kab./kota yang

dilakukan menjelang hari raya besar (Dinas Ketapang, 2022; 2023b).

- 4) Kerjasama antar BUMD Pangan yakni PT. Agrobisnis Banten Mandiri (ABM) secara B2B dengan BUMD lainnya di Provinsi Jakarta untuk menjaga pasokan, distribusi, dan harga pangan strategis.
- 5) Program Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) *Goes to School* yang dilaksanakan mulai dari tingkat Sekolah Dasar oleh Dinas Ketapang (2022).
- 6) Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yakni *capacity building* kepada UMKM dan pekerja pariwisata dalam bentuk pelatihan, permodalan, promosi melalui pameran yang diadakan 4-5 kali dalam satu bulan.
- 7) Perihal proses distribusi dan upaya memotong rantai pasok pangan sudah disediakan Toko Tani Indonesia Center Daerah (TTICD) (Dirgantara. 2018; Bapanas, t.tahun).
- 8) Khusus UMKM Pangan juga dibantu oleh Dinkopukm dalam hal ketersediaan bahan baku, kesinambungan produksi serta pemasaran produk-produk UMKM dan berfungsinya koperasi.
- 9) Pelaksanaan Program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bekerjasama dengan Perum Bulog

Walaupun dari segi kuantitas sudah meningkat dalam program dan implementasinya, namun belum ada evaluasi yang objektif terkait efektivitasnya dalam menangani permasalahan pangan di Provinsi Banten. Selain itu, Provinsi Banten belum memiliki terminal agribisnis sebagai infrastruktur strategis pengendali harga, dan juga belum memiliki Pusat Distribusi Pangan tingkat Provinsi (PDP).

KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan, maka kesimpulan yang di peroleh dari hasil pengkajian ini, secara berurutan adalah sebagai berikut:

1. Kondisi capaian program ketahanan pangan masih di bawah target yakni terkait ketersediaan, keterjangkauan atau aksesibilitas, dan pemanfaatan.
2. Permasalahan pada aspek ketersediaan yakni belum meratanya komoditas pangan, hal ini dipengaruhi juga oleh iklim, pertumbuhan penduduk, dan distribusi pangan.
3. Kondisi aspek keterjangkauan yakni pada rantai distribusi pangan sudah ideal, namun sarana dan prasarana penunjang belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari MPP total yang masih tinggi sehingga mempengaruhi harga komoditas pangan hingga ke konsumen.
4. Kondisi aspek pemanfaatan membaik, namun belum merata dan belum ideal. Hal ini karena konsumsi pangan yang belum beragam, dan minimnya pengetahuan terkait gizi pangan terutama di daerah kabupaten sebagai penyedia pasokan pangan.
5. Kurangnya aspek pemanfaatan juga disebabkan oleh belum termanfaatkannya produk pangan lokal dan cadangan pangan secara optimal untuk pemenuhan gizi masyarakat.
6. Kebijakan perundang-undangan level nasional dan daerah terkait pangan sudah komprehensif, namun masih tumpang tindih dalam implementasi berupa program dan kegiatan pada beberapa OPD.

7. Kebijakan berupa program pangan yang dilakukan perangkat organisasi sudah beragam dan rutin dilakukan, hanya saja masih menggunakan KPI (*Key Performance Indicator*) kuantitas (frekuensi per tahun), serta minim evaluasi terhadap efektivitasnya.

SARAN

Penelitian ini belum melibatkan tata kelola kelembagaan, oleh karena itu, penelitian selanjutnya sebaiknya menguraikan lebih dalam terkait koordinasi kelembagaan diantara perangkat organisasi dalam komoditas pangan. Selain itu, penelitian lanjut juga dapat mengidentifikasi *distribution center system* masing-masing wilayah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten terkait perannya dalam menggeser komoditas antar wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ansori, Muhammad. (2021) Analisis Pola Konsumsi Pangan Penduduk Kabupaten Lebak. *Jurnal Gizi Kerja dan Produktivitas* Vol. 2 No. 2.
- [2] Badan Pangan Nasional (Bapanas). (2022). Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2022.
- [3] Badan Pangan Nasional (Bapanas) (2023). Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2023.
- [4] Badan Pangan Nasional (Bapanas). (tanpa tahun). *Laporan Kajian Sistem Penyangga Pangan Kota Besar: Prototipe DKI Jakarta*, hal. 31–87.
- [5] Badan Pangan Nasional (Bapanas). (2024). Direktori Perkembangan Konsumsi Pangan Nasional dan Provinsi Tahun 2019-2023. Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Jakarta.
- [6] Badan Pusat Statistik (BPS). (2015). Distribusi Perdagangan Komoditas Jagung Pipilan Indonesia 2015.
- [7] Badan Pusat Statistik (BPS) (2019). Distribusi Perdagangan Komoditas Daging Sapi Indonesia 2019.
- [8] Badan Pusat Statistik (BPS). (2022a). Distribusi Perdagangan Komoditas Bawang Merah Indonesia 2022.
- [9] Badan Pusat Statistik (BPS). (2022b). Distribusi Perdagangan Komoditas Beras Indonesia Tahun 2022.
- [10] Badan Pusat Statistik (BPS). (2022c). Distribusi Perdagangan Komoditas Cabai Merah Indonesia.
- [11] Badan Pusat Statistik (BPS) (2022d). Distribusi Perdagangan Komoditas Ayam Ras Indonesia.
- [12] Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten. (2021). Pola Distribusi Perdagangan Komoditas Strategis Tahun 2020.
- [13] Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten. (2023a). Indikator Ekonomi Provinsi Banten Tahun 2023. Vol. 23.
- [14] Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten. (2023b). Provinsi Banten dalam Angka.
- [15] Bank Indonesia. (2023). *Tujuh Program Unggulan GNPIP 2023, Kunci*

Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan Nasional, dari Berita Terkini (Siaran Pers) <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media>, di akses tgl 4 Juli 2024.

[16] Barros, Ana Christina Hirata, Denise Brettschneider, dan B. Ballaj. (2016). *Governance Global Practice*.

[17] Budiawati, Yeni, dan Ronnie S Natawidjaja. (2020). Situasi Dan Gambaran Ketahanan Pangan di Provinsi Banten Berdasarkan Peta Fsva Dan Indikator Ketahanan Pangan. *Jurnal Agribisnis Terpadu* 13, no. 2: 187. <https://doi.org/10.33512/jat.v13i2.9866>.

[18] Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten. (2021). *Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA) Provinsi Banten Tahun 2021*.

[19] Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten. (2022). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)*.

[20] Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten. (2023a). *Profil Dinas Ketapang Provinsi Banten*.

[21] Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten. (2023b). *Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2023*.

[22] Dirgantara. 2018. *Banten Luncurkan Toko Tani Indonesia Center Daerah*, <https://banten.antaranews.com/berita/29910/banten-luncurkan-toko-tani-indonesia-center-daerah>, di akses tgl 7 Juli 2024.

[23] Food and Agriculture Organization (FAO). (2008). *An Introduction to the Basic Concepts of*

Food Security. Published by the EC - FAO Food Security Programme.

[24] Food and Agriculture Organization (FAO). (1996). *Report of The World Food Summit 1996*.

[25] Ingram, John. 'A Food Systems Approach to Researching Food Security and Its Interactions with Global Environmental Change'. *Food Security* 3 (2011): 417–31.

[26] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Buku Saku Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSHI) 2022*. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kemenkes RI.

[27] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2013). *Sumber Daya Alam Provinsi Banten dari Kacamata Penilaian*.

[28] Kementerian Pertanian RI. (2022). *Mentan: Provinsi Banten Mampu Hasilkan Produk Kedelai Lokal Berkualitas*.

[29] Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2022). *Pedoman Umum Governansi Sektor Publik Indonesia (PUG-SPI)*.

[30] Kusnandar, K. (2021). *Empowering stakeholders to organise their agricultural production and supply chains for a sustainable and inclusive future in Indonesia. Dissertation* (TU Delft).

[31] Mbow, Cheikh, Cynthia E Rosenzweig, Luis G Barioni, Tim G Benton, Mario Herrero, Murukesan Krishnapillai, Alexander C Ruane, Emma Liwenga, Prajal Pradhan, and Marta G Rivera-Ferre. (2020). 'Food Security'. *IPCC*, 2020.

- [33] Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2015). *Policy Framework for Investment*.
- [34] Pemerintah Provinsi Banten (2023). *Geografi - Website Resmi Pemerintah Provinsi Banten*.
- [35] Peraturan Gubernur (Pergub) Banten No. 62 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Harga Minimum Daerah Pangan Lokal.
- [36] Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten No. 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pangan.
- [37] Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.
- [38] Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.
- [39] Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
- [40] Porter, J.R., L. Xie, A.J. Challinor, K. Cochrane, S.M. Howden, M.M. Iqbal, D.B. Lobell, dan M.I. Travasso. (2014). *Food security and food production systems. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* [Field, C.B., V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea, and L.L. White (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 485-533.
- [41] PT. Agrobisnis Banten Mandiri (ABM). Profil PT. ABM, <https://agrobanten.co.id/>, di akses tgl 9 Juli 2024.
- [42] Rantau, Muhammad Ibrahim, Herijanto Bekti, Ida Widianingsih, dan Caroline Paskarina. (2022). Strategi Ketahanan Pertanian Pangan Menghadapi Pandemi COVID 19 Di Banten. *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional* 2021, no. September (2022): 310–18.
- [43] Rohr, Veronica, Jill Blakley, and Phil Loring. (2021). A Framework to Assess Food Security in Regional Strategic Environmental Assessment?. *Environmental Impact Assessment Review* 91: 106674.
- [44] Sejati, Wahyuning K., and Herman Supriadi. (2015). Kelembagaan Agribisnis pada Desa Berbasis Komoditas Perkebunan. Indonesian Agency for Agricultural Research and Development, 2015.
- [45] Suryana, Mansyur. (2023). Ribuan Warga Miskin Lebak Terima Beras Program Bantuan Pangan. Antara Banten, <https://banten.antaranews.com/berita/260538/ribuan-warga-miskin-lebak-terima-beras-program-bantuan-pangan>, di akses tgl 9 Juli 2024.
- [46] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.